

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui Program PEKKA di Kota Bandung dengan fokus penelitian kelompok PEKKA Balantik sudah berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya, dalam memahami setiap aspek yang ada dalam proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui Program PEKKA di Kota Bandung, peneliti menemukan bahwa:

1. Berdasarkan pada variabel kesesuaian antara program dengan penerima manfaat, peneliti melihat bahwa hal-hal yang ditawarkan oleh Program PEKKA sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para anggota PEKKA Balantik. Hal ini ditunjukkan dengan data dari para informan yaitu DP3A dan anggota PEKKA Balantik, dimana kegiatan yang rutin disediakan oleh DP3A selaku fasilitator Program PEKKA adalah pelatihan dan pembinaan guna mengembangkan kemampuan para anggota Kelompok PEKKA untuk dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan kebutuhan utama para anggota PEKKA Balantik bahwa aspek ekonomi memang merupakan kebutuhan utama mereka.
2. Berdasarkan pada variabel kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, peneliti melihat bahwa terdapat kesesuaian antara tugas yang disyaratkan dalam Program PEKKA dengan kemampuan para organisasi

pelaksana Program PEKKA di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan dari penyeleksian yang dilakukan oleh DP3A kepada calon organisasi pelaksana yang berhubungan langsung dengan kelompok PEKKA, sehingga organisasi pelaksana memiliki kemampuan yang memadai dan kriteria yang sesuai untuk dapat memenuhi tugas yang disyaratkan Program PEKKA. Namun, peneliti juga melihat dalam keterangan dari beberapa informan yaitu para organisasi pelaksana Program PEKKA di Kota Bandung, dimana tugas yang disyaratkan Program PEKKA kepada para organisasi pelaksana cenderung tidak terdeskripsi dengan baik sehingga para organisasi pelaksana juga tidak memahami betul tugas pokok seperti apa yang harus mereka lakukan dalam menjalankan Program PEKKA. Disisi lain, peneliti melihat dalam keterangan mengenai tugas yang diberikan kepada para organisasi pelaksana menggambarkan bahwa selama organisasi pelaksana mengerti akan tujuan program, maka mereka akan paham dengan tugas apa yang perlu dilakukan.

3. Berdasarkan pada variabel kesesuaian antara penerima manfaat dengan organisasi pelaksana, peneliti melihat bahwa adanya kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok PEKKA Balantik. Dimana syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program PEKKA meliputi perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga (perempuan kepala keluarga), dan memiliki rasa kemauan yang tinggi dari anggota PEKKA itu sendiri. Dan bagi mereka yang memenuhi syarat

tersebut, maka mereka mendapatkan hasil (*output*) dari program. Hal ini ditunjukkan dengan *output* (hasil) yang diperoleh oleh anggota kelompok PEKKA Balantik yang aktif mengikuti Program PEKKA, dan sangat merasakan manfaat dari pelaksanaan Program PEKKA. Namun sayangnya, masih banyak anggota PEKKA Balantik yang minim rasa kemauan untuk mengikuti kegiatan Program PEKKA di Kota Bandung. Sehingga, untuk mendapatkan *output* dari Program PEKKA menjadi sulit untuk mereka yang memiliki rasa kemauan yang kecil walaupun mereka sudah memenuhi kriteria sebagai perempuan kepala keluarga.

6.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran untuk mengatasi berbagai kendala yang masih bisa ditemukan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Bandung:

1. Dibutuhkan Surat Keputusan (SK) terkait pelaksanaan Program PEKKA di Jawa Barat khususnya Kota Bandung, agar para organisasi pelaksana paham betul dengan tugas apa yang harus dilakukan dan *detail* lainnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Program PEKKA di Kota Bandung.
2. Sosialisasi terkait Program PEKKA di Kota Bandung perlu diperluas dan diperbanyak agar banyak perempuan kepala keluarga mengetahui keberadaan Program PEKKA, mengingat bahwa data keluarga yang

dikepalai perempuan di Kota Bandung dengan anggota yang terdaftar dalam Program PEKKA di Kota Bandung sangat jauh jumlahnya.

3. Organisasi pelaksana perlu mengkoordinir kegiatan pertemuan antar anggota PEKKA yang rutin dilaksanakan dalam menjalankan Program PEKKA, agar mereka yang pasif namun terdaftar sebagai anggota PEKKA dapat kembali aktif dalam pelaksanaan Program PEKKA. Kegiatan pertemuan yang rutin dilakukan dapat memelihara keaktifan dari setiap anggota PEKKA untuk selalu berkontribusi dalam pelaksanaan Program PEKKA.
4. Pendamping Lapangan Program PEKKA sebagai salah satu aktor pemberdaya (organisasi pelaksana) perlu lebih dari satu orang, hal ini diperlukan mengingat bahwa Pendamping Lapangan Program PEKKA di Kota Bandung hanya satu orang dan perlu mendampingi 21 kelompok PEKKA di Kota Bandung (perkecamatan), hal ini dapat dapat mempengaruhi kemampuan dari organisasi pelaksana untuk menjalankan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti & Rachmawati. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Riset Keperawatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama).
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Denrich, Suryadi. (2004). *Gambaran Konflik Emosional Dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*. Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).
- Herujito, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2010). *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Indriantoro, Nur., Supono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Julia, Sopha. (2010), *Efektifitas Program Bantuan 121 Operasional Sekolah*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kirkpatrick, Donald L. (1988). *Evaluation Training Program, the Four Level 2nd Ed*. San Fransisco: Berrett-Koehler, Inc.
- Korten, David C, “Model Kesesuaian”, dalam Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Kebijakan Publik, 2000.
- Kristiadi, J.R. (1994). *Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja sektor publik*. yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosdakarya.

- Munandar, Utami. (1985). *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia. Suatu Tinjauan Psikologis*. Depok UI Press.
- Patilima, (2005). *Teknik Analisis Data*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sastroasmoro, Sudigdo & Ismael, Sofyan. (2008). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke – 3*. Jakarta: Sagung Seto.
- Straus, Anselm., & Corbin, Juliet. (2013). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media).

Sumber Internet

- AntaraNews. 2018. "Pemprov Jabar Luncurkan Program Pemberdayaan Perempuan "Sekoper Cinta"". <https://www.antaraneews.com/berita/778712/pemprov-jabar-luncurkan-program-pemberdayaan-perempuan-sekoper-cinta>, Diakses 20 Mei 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Konsep dan Definisi: Survei Sosial Ekonomi Nasional*. https://sirusa.bps.go.id/webadmin/pedoman/2017_1558_ped_Buku%20Konsep%20Definisi.pdf. Diakses 25 September 2021.
- Dianawanti, V. 2019. *She Means Business, Majukan Bisnis Perempuan Indonesia via Media Sosial*. <https://m.fimela.com/amp/4117062/she-means-business-majukan-bisnis-perempuan-indonesia-via-media-sosial>. Diakses 20 Mei 2022.

- DP3AKB Jabar. *Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)*.
<http://dp3akb.jabarprov.go.id/official/brosurleaflet/>, Diakses 21 Mei 2022.
- Dqlab.id. 2021. *Mengenal Analisis Konten dalam Analisis Data Kualitatif*.
<https://www.dqlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif>. Diakses 22 Mei 2022.
- KEMENKO PMK. 2020. *Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas*.
<https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>. Diakses 25 September 2021.
- KPPPA RI. 2018. *Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat*.
<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>. Diakses 25 September 2021.
- Kumparan. 2021. *Ciri Masyarakat Sejahtera di Sebuah Negara*.
<https://kumparan.com/berita-update/ciri-masyarakat-sejahtera-di-sebuah-negara-1wVDGgbHdtZ/full>. Diakses 21 Mei 2022.
- Open Data Jabar. 2021. *Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kepala-keluarga-berdasarkan-jenis-kelamin-di-jawa-barat>, Diakses 19 Mei 2022.
- PEKKA. *Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Latar Belakang)*,
<https://pekka.or.id/latar-belakang/>. Diakses 25 September 2021.
- PEKKA. *“Ekonomi dan Penghidupan Berkelanjutan”*.
<https://pekka.or.id/ekonomi-dan-penghidupan-berkelanjutan/>. Diakses 22 Mei 2022.
- Pluang. 2020. *Penerima Manfaat (Beneficiary)*.
<https://pluang.com/id/blog/glossary/beneficiary-adalah>. Diakses 20 Mei 2022.
- PPID Kota Bandung. *Data Statis Kecamatan Antapani*.
https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=13699. Diakses 18 Mei 2022.
- Revisi III Buku Profil DP3A Kota Bandung Tahun 2021.
<http://standar pelayanan.bandung.go.id/loker/a29a62811ed52ea4c5f757932dd40edb/2021/eb51663e3b1967e3cbd37995ca80421b.pdf>, Diakses 18 Mei 2022.

SMERU. 2011. *Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*.
https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/accesstojustice_ind.pdf.
Diakses 25 September 2021.

SMERU. *Laporan Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBBK-PEKKA) tahun 2014*.
<https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/buku-1.pdf>.
Diakses 25 September 2021.

Sumber Kebijakan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Kertas Kebijakan Kesetaraan Gender tahun 2011.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.